

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Kajian Participatory Action Research di Desa Beras Basah

Suci Rahmadani ^a, Sri Herlina ^b, Asmayani ^c, Weny Lovia Angriani ^d, Lewis Pramana Lubis ^e, Dana Syahputra Barus ^{f*}

^{a,b,c,d,e,f} Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the community empowerment model implemented in Beras Basah Village, North Sumatra, focusing on active citizen participation as the core of development. The research employed a qualitative descriptive approach through the *Participatory Action Research* (PAR) model. Data were collected through interviews, focus group discussions, and field observations involving local officials, fishermen's groups, and coastal women. The findings indicate that the success of empowerment initiatives largely depends on collaboration among local government, the community, and academia. Collective commitment to environmental preservation, participatory leadership, and the establishment of locally based institutions emerged as key factors sustaining the program's continuity. Beyond improving income, empowerment has fostered social solidarity, collective responsibility, and critical awareness regarding sustainable resource management. Thus, community empowerment in Beras Basah Village not only enhances economic resilience but also strengthens social foundations rooted in adaptability and democratic values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Beras Basah, Sumatera Utara, dengan menekankan partisipasi aktif warga sebagai subjek pembangunan. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, diskusi kelompok, dan observasi lapangan yang melibatkan aparat desa, kelompok nelayan, serta perempuan pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi. Komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, kepemimpinan lokal yang partisipatif, dan pembentukan kelembagaan berbasis kebutuhan sosial-ekonomi menjadi faktor utama yang menopang keberlanjutan program. Selain peningkatan pendapatan, pemberdayaan juga memperkuat solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, serta kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Desa Beras Basah tidak hanya berdampak pada perbaikan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi sosial yang adaptif dan demokratis.

ARTICLE HISTORY

Received 4 October 2025
Accepted 15 October 2025
Published 30 October 2025

KEYWORDS

Community Empowerment;
Coastal Area; Participation;
Local Institutions; Sustainability.

KATA KUNCI

Pemberdayaan Masyarakat;
Pesisir; Partisipasi; Kelembagaan
Lokal; Keberlanjutan.

1. Pendahuluan

Penduduk di wilayah pesisir umumnya memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah. Pada musim barat, sebagian nelayan tidak dapat melaut dan hanya bergantung pada hasil tangkapan laut yang terbatas. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai langkah prioritas (Achmad, 2022). Sektor perikanan masih menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir, namun ketidakpastian hasil tangkapan telah menimbulkan kerentanan ekonomi bagi keluarga nelayan (Kristiyanti, 2016). Pembangunan yang berorientasi pada manusia menempatkan

masyarakat sebagai subjek utama yang harus diberdayakan (Korten, 1984). Pemberdayaan baru dapat terwujud apabila disertai proses penyadaran, koordinasi, pendidikan, motivasi, pembinaan, serta pendampingan berkelanjutan (Stewart, 1994). Dalam kerangka ini, keberadaan modal fisik dan modal manusia menjadi faktor penentu keberhasilan (Parida & Setiamandani, 2019). Korten (1984) memaknai pemberdayaan sebagai upaya yang mendorong kesadaran masyarakat melalui pembinaan dan bimbingan agar mampu meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan. Stewart (1994) menegaskan bahwa ketidakberdayaan masyarakat bersumber dari faktor-faktor internal maupun eksternal yang menghambat kreativitas serta kemandirian bertindak. Kirdar dan Silk (1995) menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak dan otonomi masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dengan meminimalkan intervensi eksternal.

Kismantoroedji (2003) mengamati bahwa pola kemitraan yang tidak seimbang antara masyarakat dan pihak eksternal cenderung tidak menghasilkan proses pemberdayaan yang efektif. Dalam konteks tersebut, pendampingan sering kali lebih menonjol dibanding aspek penyadaran, pendidikan, atau pembinaan. Widowati (2016) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi dengan orientasi nilai tambah dan pasar yang luas mendorong masyarakat tani untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari proses hulu hingga hilir. Sementara itu, Rohayati dan Saleh (2022) menemukan bahwa pemberdayaan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPHT) menghadapi sejumlah kendala implementatif. Meskipun tingkat partisipasi petani tergolong tinggi (76%), prinsip dasar SLPHT belum berjalan optimal karena keterbatasan dukungan teknis dan kapasitas sumber daya manusia. Desa Beras Basah memiliki potensi kelautan yang besar dan seharusnya dapat menjadi tumpuan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Namun, kekayaan tersebut belum diikuti oleh peningkatan taraf hidup yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang tidak didukung oleh sistem kelembagaan dan regulasi yang kuat. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai juga menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pendapatan nelayan di Beras Basah sangat dipengaruhi oleh kondisi alam.

Pada periode angin kencang, gelombang tinggi, atau arus laut kuat, nelayan tidak dapat melaut sehingga mengalami masa paceklik. Selain faktor cuaca, keterbatasan sarana penangkapan ikan juga menjadi masalah utama. Sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu tradisional dan alat tangkap sederhana yang tidak memenuhi standar keselamatan maupun efisiensi. Akibatnya, jangkauan penangkapan ikan menjadi terbatas dan hasil tangkapan rendah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan program pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat nelayan dan melibatkan mereka secara aktif sebagai pelaku utama pembangunan (Suryadi & Sufi, 2019). Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan pemangku kepentingan yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan (Handoko, 2017). Pendekatan yang berpusat pada masyarakat diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan baik secara ekonomi maupun sosial. Atas dasar itu, diperlukan model pengembangan baru yang mampu mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dipandang relevan karena mendorong masyarakat berperan aktif dalam seluruh siklus perubahan sosial—mulai dari perencanaan, tindakan, hingga refleksi. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat pembangunan secara berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan memahami secara menyeluruh fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat pesisir tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan partisipan dalam konteks alami, menggunakan bahasa dan deskripsi yang kontekstual (Moleong, 2016). Model yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan riset kolaboratif yang memadukan tindakan dan refleksi secara simultan untuk menghasilkan perubahan sosial yang terarah. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam keseluruhan proses penelitian—mulai dari perumusan masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi hasil (Ranson &

Stewart, 1994; Habib, 2021). Dalam pelaksanaan PAR, peneliti dan komunitas bekerja sama mendefinisikan permasalahan secara ilmiah dan mengembangkan strategi aksi yang berbasis pada pengetahuan lokal serta kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan membangun kapasitas komunitas melalui pembelajaran kolektif (Akhyadi & Sadikin, 2020; Endah, 2020). Melalui keterlibatan langsung warga, penelitian diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan lokal, mengembangkan solidaritas sosial, serta mendorong munculnya inovasi berbasis potensi wilayah (Djafar & Sune, 2019; Permana, Sasmito, & Gunawan, 2018).

Secara operasional, penelitian ini dilaksanakan di Desa Beras Basah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Kegiatan penelitian berlangsung pada bulan Juni hingga Agustus 2025, melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti aparat desa, kelompok nelayan, dan perempuan pesisir sebagai partisipan utama. Pelaksanaan penelitian mengikuti siklus PAR yang terdiri atas empat tahap utama:

1. Perencanaan (planning) – mengidentifikasi masalah prioritas melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dan wawancara semi-terstruktur.
2. Tindakan (action) – melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang disepakati bersama, seperti pelatihan, penguatan kelompok nelayan, dan kegiatan konservasi.
3. Observasi (observation) – melakukan pemantauan langsung terhadap perubahan perilaku, partisipasi, serta dampak sosial yang muncul.
4. Refleksi (reflection) – meninjau kembali hasil tindakan bersama masyarakat untuk memperbaiki strategi pada siklus berikutnya.

Pendekatan ini menekankan keterlibatan partisipatif semua pihak dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program, sesuai prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam memperkuat kemandirian dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

3. Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Beras Basah melalui pelaksanaan penelitian partisipatif yang menitikberatkan pada pendefinisian masalah dan penerapan informasi guna menghasilkan tindakan yang berorientasi pada solusi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan daerah, tokoh masyarakat, dan dosen pelaksana kegiatan sebagai narasumber utama. Selain itu, data diperoleh dari beberapa informan yang dianggap memahami dinamika pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

3.1 Karakteristik Narasumber Pengabdian Masyarakat

Tabel 1 berikut menggambarkan karakteristik narasumber yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat:

No	Narasumber	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Suci Rahmadani, S.Pd., M.Ak.	S2 Akuntansi	Dosen
2	Sri Herlina, S.E., M.A.	S2 Ekonomi Syariah	Dosen
3	Asmayani, M.Hum.	S2 Hukum	Dosen
4	Lewis Pramana Lubis, S.H.I., M.S.I.	S2 Studi Islam	Dosen
5	Dana Syahputra Barus, S.Pd., M.E.	S2 Ekonomi Syariah	Dosen

Seluruh narasumber merupakan akademisi yang memiliki latar belakang multidisipliner, sehingga mampu memberikan perspektif yang beragam dalam analisis pemberdayaan masyarakat pesisir.

3.2 Komitmen Bersama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan landasan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan pesisir. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak Zulkarnain selaku Lurah Desa Beras Basah (Gambar 1), disampaikan bahwa kerja sama lintas lembaga dan masyarakat

menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Ia menekankan pentingnya kolaborasi melalui kegiatan nyata seperti penanaman mangrove untuk mendukung ekosistem laut serta mencegah abrasi pantai. Selain itu, masyarakat didorong untuk melakukan pembersihan rutin di area pesisir agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.



Gambar 1. Diskusi dengan Bapak Zulkarnain selaku Lurah Desa Beras Basah

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip saling percaya dan saling menjaga kesepakatan menjadi dasar bagi keberlangsungan kerja sama yang sehat antara masyarakat dan pemerintah desa. Komitmen tersebut mencerminkan semangat tanggung jawab bersama yang tidak hanya berorientasi pada manfaat lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.3 Kepemimpinan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Hasil diskusi dengan perwakilan masyarakat menunjukkan bahwa peran kepemimpinan lokal (local leader) menjadi faktor penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pesisir (Gambar 2). Menurut Sri Herlina, pemimpin kelompok atau coach sebaiknya berasal dari masyarakat setempat yang memiliki tanggung jawab, integritas, serta keterampilan memadai untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan. Pendekatan berbasis kelompok seperti ini terbukti efektif karena mendorong rasa memiliki dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat.



Gambar 2. Diskusi bersama Masyarakat Beras Basah

Model kepemimpinan partisipatif yang diterapkan dalam program pemberdayaan pesisir di Desa Beras Basah memungkinkan terjadinya proses belajar bersama. Setiap kelompok nelayan memiliki seorang pemimpin yang berperan sebagai penggerak utama dalam perencanaan kegiatan, pembagian tugas, serta evaluasi hasil. Pendekatan ini juga membantu menumbuhkan kepercayaan sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber daya laut.

3.4 Pembentukan Kelembagaan Lokal sebagai Pilar Pemberdayaan

Aspek kelembagaan menjadi bagian penting dalam memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dana Syahputra Baru (Gambar 3), disampaikan bahwa pembentukan kelembagaan lokal berbasis kebutuhan sosial dan ekonomi berperan penting dalam menjaga kesinambungan kegiatan masyarakat pesisir. Kelembagaan lokal dapat berfungsi sebagai wadah koordinasi antara kelompok usaha, pemerintah desa, dan lembaga pendukung lain.



Gambar 3. Peletakan/Peresmian Plang Pengabdian

Dalam konteks Desa Beras Basah, pembentukan kelembagaan ini diwujudkan melalui pendirian kelompok usaha masyarakat dan kegiatan konservasi lingkungan yang dikelola bersama. Model kelembagaan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan pesisir. Selain itu, kegiatan seperti penanaman mangrove, pelatihan pengelolaan hasil laut, dan forum koordinasi triwulan menjadi bagian dari sistem kerja yang lebih terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Beras Basah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pembangunan kelembagaan sosial yang adaptif. Pendekatan kolaboratif antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah menjadi strategi utama dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi serta memastikan keberlanjutan program pemberdayaan di wilayah pesisir.

4. Pembahasan

Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan di Desa Beras Basah memerlukan strategi pemberdayaan yang menekankan kemandirian dan partisipasi aktif warga. Program pemberdayaan yang diterapkan harus berfokus pada penyelesaian masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir, dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan (Suryadi & Sufi, 2019; Handoko, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan *people-centered development* yang dikemukakan oleh Korten (1984), yang menegaskan bahwa pembangunan sejati hanya dapat terjadi ketika masyarakat memiliki kendali terhadap proses pengambilan keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Beras Basah berjalan efektif ketika dikelola melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep *participatory governance* yang menekankan pentingnya kemitraan antara warga dan institusi dalam menciptakan perubahan sosial (Ranson & Stewart, 1994). Dalam konteks pesisir, pendekatan kolaboratif menjadi relevan karena kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial (Kristiyanti, 2016; Achmad, 2022). Berdasarkan hasil temuan lapangan, pola pemberdayaan yang dilakukan mengandung elemen utama dari pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)*, yaitu pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber kekuatan untuk mencapai perubahan (Habib, 2021; Endah, 2020). Potensi tersebut meliputi kecerdasan sosial, kepedulian, semangat gotong royong, dan solidaritas masyarakat yang menjadi dasar munculnya partisipasi aktif. Pendekatan berbasis aset terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan strategi top-down yang bergantung

pada bantuan eksternal, karena masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Akhyadi & Sadikin, 2020). Keberhasilan pemberdayaan juga ditentukan oleh keterlibatan para *stakeholders* sebagai agen perubahan. Parida dan Setiamandani (2019) menegaskan bahwa peran agen internal dan eksternal sangat penting dalam menyediakan sarana, akses, serta ruang partisipasi yang mendorong munculnya kepercayaan sosial (*social trust*).

Dalam penelitian ini, para dosen pendamping berperan sebagai fasilitator eksternal yang membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan dan merancang solusi berbasis kebutuhan riil, sementara tokoh masyarakat berfungsi sebagai penggerak internal yang menjembatani kepentingan lokal dan kebijakan desa. Kolaborasi ini sejalan dengan gagasan Kirdar dan Silk (1995) mengenai pentingnya pengakuan terhadap otonomi masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip pemberdayaan yang ditemukan di Desa Beras Basah konsisten dengan empat dimensi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Friedman (1992) dan Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007). Pertama, prinsip penyediaan sumber daya dan keterampilan yang berkelanjutan, yang dalam penelitian ini tercermin melalui pelatihan pengelolaan hasil laut dan konservasi mangrove. Kedua, prinsip peningkatan kapasitas masyarakat lokal, diwujudkan melalui pembentukan kelompok nelayan dan forum koordinasi triwulan yang memperkuat kemampuan organisasi komunitas. Ketiga, prinsip peningkatan kemandirian, yang ditandai dengan terbentuknya kelembagaan lokal berbasis potensi ekonomi masyarakat pesisir, seperti kelompok usaha bersama dan lembaga pengelola lingkungan. Keempat, prinsip kesejahteraan sosial, di mana kegiatan pemberdayaan tidak hanya menargetkan peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Selain faktor struktural, dimensi kultural juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, rasa tanggung jawab kolektif, dan tradisi kerja sama menjadi modal sosial yang memperkuat keefektifan program (Djafar & Sune, 2019; Permana, Sasmito, & Gunawan, 2018). Modal sosial tersebut menciptakan hubungan yang saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendamping, sekaligus mendorong munculnya kepemimpinan lokal yang visioner dan berkarakter. Kepemimpinan semacam ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan kegiatan serta memastikan partisipasi masyarakat tetap aktif (Widowati, 2016). Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dipahami sebagai proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan (*learning society*), sebagaimana dikemukakan oleh Ranson dan Stewart (1994). Proses ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan menumbuhkan kesadaran kritis dan kemampuan reflektif masyarakat untuk mengelola perubahan. Dengan demikian, pemberdayaan di Desa Beras Basah bukan hanya menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga membangun fondasi sosial dan kelembagaan yang memungkinkan masyarakat pesisir untuk beradaptasi terhadap tantangan lingkungan dan ekonomi yang terus berubah.

5. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat di Desa Beras Basah menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan kegiatan mampu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pengembangan potensi individu sekaligus memperkuat solidaritas kelompok. Proses pemberdayaan yang berlandaskan partisipasi tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan, tetapi juga memperluas ruang bagi munculnya kemandirian kolektif. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat menjadi lebih berdaya dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokalnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak sekadar memperbaiki aspek ekonomi, melainkan juga memperkuat nilai-nilai demokratis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah setempat yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk melakukan penelitian/pengabdian di Desa Beras Basah. Kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian/pengabdian ini. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya penelitian/pengabdian ini.

Referensi

- Achmad, W. (2022). Dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat di wilayah pesisir. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4985–4994. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4054>
- Akhyadi, A. S., & Sadikin, I. S. (2020). The construct of community empowerment through social compass strategy: Case study of empowerment in processing waste and water hyacinth. *EDUCARE*, 13(1), 27–48. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-20875-11_1738
- Djafar, R., & Sune, U. (2019). Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pohuwato. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(3), 246–270. <https://doi.org/10.52166/madani.v11i3.1720>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Handoko, B. (2017). Implementasi kebijakan Lanal Kotabaru dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. *Jurnal Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, 1(1), 44–64. <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/718>
- Kirdar, U., & Silk, L. (Eds.). (1995). *People: From impoverishment to empowerment*. New York University Press.
- Korten, D. C. (1984). *People-centered development: Contributions toward theory and planning frameworks*. Kumarian Press.
- Kristiyanti, M. (2016, July). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*. Stikubank University.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parida, J., & Setiamandani, E. D. (2019). Pengaruh strategi pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 146–152.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64–74. <https://doi.org/10.52166/madani.v10i2.1054>
- Ranson, S., & Stewart, J. (1994). *Management for the public domain: Enabling the learning society*. Bloomsbury Publishing.

- Rohayati, R., & Saleh, K. (2022). Pemberdayaan petani cabai merah keriting melalui program sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) di Desa Pamarayan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(1).
- Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118–140. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>
- Widowati, I. (2016). Pengaruh pemberdayaan terhadap karakteristik sosial-ekonomi petani cabai merah di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12462>